

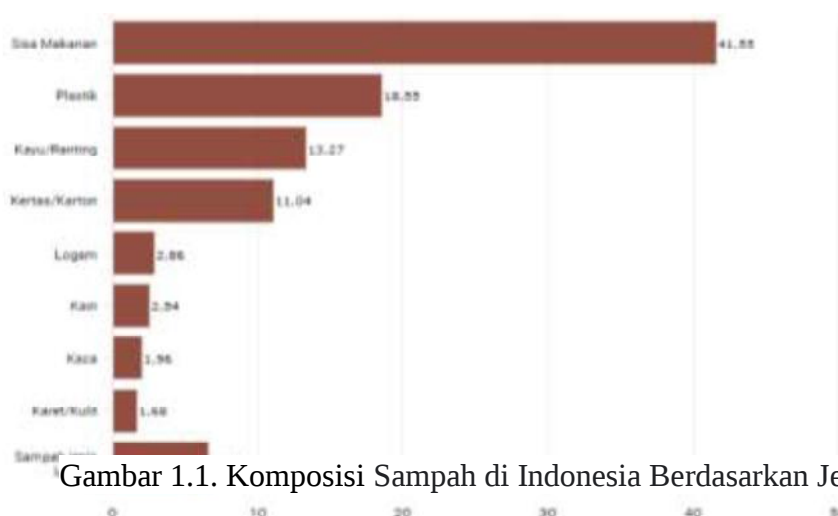
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, bisnis, atau proses produksi rumah tangga disebut sebagai sampah. Salah satu sumber masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi alam yang semakin memburuk adalah sampah. Isu sampah menjadi isu sosial yang berpotensi memicu konflik, bukan hanya isu lingkungan dan kebersihan (Damanhuri, 2010). Seiring berjalannya waktu, sampah telah berkembang dari isu lingkungan menjadi isu sosial kemasyarakatan yang berdampak pada konflik.

Pengelolaan sampah adalah masalah yang signifikan, terutama di kota-kota dengan populasi yang tinggi. Sampah adalah produk sampingan dari aktivitas manusia, baik domestik maupun komersial, sehingga selalu ada di mana pun ada aktivitas manusia. Secara alami, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi juga akan meningkat dan menjadi lebih kompleks, dan ketika bisnis berkembang dengan cepat, sejumlah besar sampah dalam berbagai bentuk dihasilkan. Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton sampah pada tahun 2022, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika dilihat dari data secara nasional, sumber sampah yang menjadikan penyumbang terbesar sebagaimana telah dijabarkan oleh tabel terlampir.



Gambar 1.1. Komposisi Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenis Tahun 2022

Sumber: (Kementerian Lingkungan Hidup, 2023)

Berdasarkan sajian grafik di atas Pada tahun 2022, sampah makanan akan mencapai 41,55 persen dari seluruh sampah yang dihasilkan di negara ini. Sampah yang terbuat dari plastik berada di urutan kedua dengan persentase 18,55 persen. Pada tahun 2022, kayu atau ranting menyumbang 13,27% dari sampah Indonesia, diikuti oleh sampah kertas/kardus sebesar 11,04% dan sampah logam sebesar 2,86%.

Metode 3R (Reuse, Recycle, dan Reduce) digunakan untuk memilah sampah dari sumbernya hingga proses pengelolaan akhir untuk mengurangi sampah. Sementara itu, pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah dan dilanjutkan dengan pewadahan sampah dan pengolahan sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir. Salah satu daerah yang memiliki tugas terkait pengelolaan sampah adalah Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang sendiri, sampah dapat menumpuk cukup banyak. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Batang akhirnya mengambil tindakan akibat sampah ini. Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Batang untuk menjaga kebersihan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan di sana. Setiap tahunnya, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randu Kuning Tegalsari terus meningkat. Jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Batang selama delapan tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Volume Sampah dari Tahun 2010- 2019 di Kabupaten Batang

Tahun	Produksi Sampah	Terangkut	Persentase
<i>Year</i>	<i>Waste Production</i>	<i>Transported</i>	<i>Percentage</i>
2010	24 3,29	14 1,99	5 8,36
2011	24 9,48	14 5,98	5 8,51
2012	25 2,42	14 9,54	5 9,24
2013	26 1,53	15 2,16	5 8,18
2014	26 5,3	15 7,78	5 9,47
2015	31 3,2	19 5,7	6 2,48
2016	39 0,9	2 44,3	6 2,5
2017	34 4,96	7 1,95	2 0,86
2018	22 8,71	7 6,51	3 3,45
2019	23 0,57	8 1,63	3 5,40

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kab Batang, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 volume sampah dari tahun 2010-2019 di Kabupaten Batang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 semakin meningkat, namun di tahun 2017 dan 2019 volume sampah di Kabupaten Batang mengalami penurunan. Menurut data statistik terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya adalah sekitar 40 ton,

dimana hanya sekitar 15 ton yang dapat dibawa ke TPA setiap harinya, dengan kapasitas pembuangan harian sekitar 35 ton. Mayoritas sampah yang dihasilkan di Kabupaten Batang adalah sampah rumah tangga atau perumahan, dimana 77,89% merupakan sampah organik. Sampah ini dikirim ke TPA Randu Kuning Tegalsari sebanyak dua hingga empat kali sehari. Selanjutnya, menurut informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batang, 78,34% dari sampah tersebut merupakan sampah organik, sedangkan 21,66% sisanya merupakan sampah anorganik.



Gambar 1.2. TPA Randukuning Kabupaten Batang Tahun 2023

Sumber: (.Batangkab.go.id, 2023)

Dari hasil gambar diatas merupakan berbagai macam sampah yang dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan akhir Randukuning Batang sehingga membentuk gunung sampah. Masalah sampah di kabupaten batang hampir sama.

Masih menggunakan sistem open dumping atau sanitary landfill, hanya itu saja sehingga menumpuk tak terkendali.



Gambar 1.3. Satu Alat Berat yang beroperasi di TPA Randukuning

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Batang 2024

Selain itu , Keterbatasan Alat Berat yang beroperasi di TPA Randukuning menjadikan sampah yang berada di wilayah TPA semakin cepat menumpuk sedangkan alat berat hanya beroperasi 1 unit saja untuk meratakan dan memilah sampah. (Wawancara Pribadi Petugas TPA Randukuning, 2023)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Kota ini masih mengelola sampah dengan model kuno kumpul-angkut-buang. Alat pengangkutan dan pengolahan sampah yang ada belum mampu menangani seluruh sampah yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memindahkan sampah dari banyak lokasi terhambat oleh ketiadaan armada di Kabupaten Batang.



Gambar 1.4. Truk Sampah DLH Kabupaten Batang

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Karena armada pengangkut sampah yang ada hanya berjumlah 13 unit - yang masing-masing dapat mengangkut tiga truk pengangkut sampah - untuk mengakomodasi sampah di seluruh Kabupaten Batang, maka jumlah truk pengangkut sampah yang ada tidak mencukupi untuk mengangkut sampah dari kecamatan ke TPA. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya berada di wilayah Pantura dan delapan di Kecamatan Batang, 13 unit truk pengangkut sampah itu beberapa mengalami kerusakan seperti kerusakan mesin ataupun ban. Karena keterbatasan armada, dalam sehari pengangkutan sampah hanya dilakukan pada pagi dan sore hari (Wawancara Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Batang, 2023)

Tempat Pembuangan Sampah atau TPA di Kabupaten Batang terletak di TPA Randukuning Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman yang sudah overload, Hal ini dikarenakan sampah dari seluruh kecamatan diterima di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Randukuning yang terletak di dekat Kota Batang. Sementara itu, sampah di Kabupaten Batang dibuang dengan cara memindahkannya dari desa ke kota. Berlawanan dengan apa yang seharusnya terjadi, sampah dipindahkan dari kecamatan dan kemudian dibuang ke TPA kota.

Tabel 1.2. Jenis Jenis Sampah yang ada di Kabupaten Batang

BISA DIKOMPOSKAN	TIDAK BISA DIKOMPOSKAN	MASUK LUBANG RESAPAN BIOPORI
Daun segar dan kering	Keju, mentega, susu	Daun kebun
Buah , sayur, ranting	Sisa daging, ikan, udang	Sisa daging, ikan, udang
Nasi dan sayur sisa	Kulit & isi durian	Sisa kue/roti
Ampas teh, kopi, kelapa, jus	Biji buah yg keras	Sisa sayur, nasi
Kulit telur, ktrn hewan	Pelepah kelapa, pinang	Sisa buah
Sekam, serbuk gergajian kayu	Batang pohon	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Pengelolaan sampah merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak daerah, khususnya di negara berkembang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuri Adha (2020) mengenai manajemen pengelolaan sampah di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan bahwa salah satu pendekatan efektif dalam pengelolaan sampah adalah melalui bank sampah. Program tersebut melibatkan masyarakat dari berbagai usia, termasuk pelajar, untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari lingkungan mereka. Pengelolaan sampah di kawasan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan yang baik. Di sisi lain, penelitian oleh Anggraini (2019) di Kota Semarang mengungkapkan tantangan yang berbeda, di mana pengelolaan sampah di Perumahan Sulanji Graha

belum berjalan optimal karena masalah dalam pemisahan sampah organik dan anorganik, yang berdampak pada kebersihan lingkungan dan perekonomian setempat. Hasil penelitian Aditya (2022) di Rusunawa Pekunden menunjukkan kendala dalam manajemen pengelolaan sampah seperti kurangnya partisipasi penghuni dalam pemisahan sampah yang mengindikasikan pentingnya peningkatan dalam pengorganisasian dan pengawasan. Penelitian lain oleh Suryo (2021) di Kota Pekanbaru juga menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di daerah tersebut tidak memenuhi standar pelayanan, serta memperlihatkan pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan sampah. Di sisi positif, penelitian oleh Kakesing et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sitaro cukup baik, menyoroti keberhasilan program yang telah diterapkan. Temuan dari Ponamban et al. (2019) di Desa Kinali juga mencerminkan bahwa pengelolaan sampah belum optimal, serupa dengan temuan yang dihasilkan oleh Ariyanti et al. (2022) mengenai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menunjukkan performa baik dalam pengelolaan sampah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas dan tantangan pengelolaan sampah di berbagai lokasi, di mana masing-masing penelitian memiliki kesamaan dalam metodologi, namun berbeda dalam fokus dan lokus penelitian. Secara keseluruhan, tantangan dalam pengelolaan sampah seringkali berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Zohoori dan Ghani (2017) serta Ilankoon et al. (2018). Pengelolaan yang efektif sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan regulasi yang

mendukung, yang merupakan elemen utama untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.

Penelitian ini menarik dan penting karena mengangkat isu penting yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian mengenai manajemen pengelolaan sampah di TPA Randukuning Kabupaten Batang relevan dalam konteks dinamika urbanisasi dan peningkatan jumlah sampah akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Menurut Rodic dan Wilson (2017), isu sampah tidak hanya berhubungan dengan masalah lingkungan dan kebersihan, tetapi juga dapat menjadi isu sosial yang berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Kabupaten Batang menjadi contoh nyata di mana sistem pengelolaan sampah yang belum memadai menciptakan masalah yang semakin kompleks, khususnya di TPA Randukuning yang telah mengalami kelebihan kapasitas.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang kendala-kendala pengelolaan sampah di wilayah yang masih menggunakan model pengelolaan tradisional seperti kumpul-angkut-buang. Meskipun metode 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*) telah diakui secara luas sebagai solusi pengelolaan sampah, implementasinya di tingkat daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan anggaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Batang. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang (2023), hanya sekitar 15 ton sampah yang dapat diangkut ke TPA setiap hari dari sekitar 40 ton sampah yang dihasilkan, dan keterbatasan

alat berat serta armada pengangkut menjadi hambatan besar dalam proses pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting karena menyoroti kelemahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan sampah seharusnya lebih efisien dan berkelanjutan, namun peningkatan volume sampah harian yang signifikan di Kabupaten Batang menunjukkan adanya *gap* antara regulasi dan praktik di lapangan. Menurut data pemerintah Kabupaten Batang (2018), hanya sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk pengelolaan sampah, di mana sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji, sementara pengadaan alat pengelolaan sampah modern tertunda karena keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menarik, tetapi juga mendesak untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Batang, serta berpotensi menjadi acuan bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terus menjadi dokumen panduan untuk pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Batang. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur pengelolaan sampah

di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan pedoman, peraturan, kebijakan, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Menurut Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2019, pengelolaan sampah di Kabupaten Batang masih belum memadai. Hal ini terlihat dari peningkatan tonase sampah harian di Kabupaten Batang yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada 2018-2019, per hari volume sampah di Batang di kisaran 150 ton hingga 200 ton. Lalu, saat ini sudah mencapai 500 ton sampah per hari. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Batang No 40 Tahun 2019.

Selain itu Keterbatasan anggaran untuk penanganan sampah yang sangat minim. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, masalah keuangan membatasi kemampuannya untuk mengelola sampah. Hanya sekitar Rp 6 miliar dari dana tersebut yang masuk ke DLH. Dari jumlah tersebut, Rp 5 miliar digunakan untuk membayar gaji karyawan (Pemerintah Kabupaten Batang, 2018). Akibatnya, pembelian peralatan pengolahan sampah yang mutakhir menjadi tertunda. Bahkan armada pengangkut sampah yang sekarang digunakan pun harus bekerja. Sebagian besar tidak aman untuk dikendarai dan membahayakan pengemudi lain. Diputuskan bahwa anggaran perbaikan tidak memadai. Hanya 100 juta yang tercapai dari jumlah yang direncanakan” (Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 2023). Berdasarkan Fenomena yang telah dijabarkan di atas terdapat pertanyaan **“Mengapa Sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Batang di Tempat Pembuangan Sampah Randukuning selalu menumpuk setiap hari”?**. Oleh sebab itu , peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Sampah di TPA Randukuning Kabupaten Batang.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kondisi sarana dan prasarana yang berada di TPA Randukuning yang masih belum optimal
2. Terjadi penumpukan sampah yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah mesin pengolah sampah di TPA Randukuning
3. Masih belum optimalnya anggaran yang digelontorkan untuk mengelola sampah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang terurai di atas maka penelitian yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang?
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang?

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memiliki aplikasi teoritis dan praktis, seperti berikut ini:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan, menjadi dasar untuk studi perbandingan tambahan, dan memberikan ide-ide ilmiah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang memajukan penelitian dan pengembangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Batang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan higienis bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Batang

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Temuan studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Nuri Adha dengan judul “Manajemen Pengelolaan Sampah di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.” Temuan penelitian ini dapat disimpulkan. Pendekatan pertama yang digunakan untuk pengelolaan sampah di Gampong Nusa, Kecamatan Lhokngaa, Kabupaten Aceh Besar adalah dengan adanya bank sampah yang utamanya melayani masyarakat sekitar gampong, mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Yang mereka lakukan adalah mengumpulkan sampah dari tempat tinggal mereka sendiri atau mencari sampah di sekitar mereka. Setelah terkumpul, sampah tersebut ditimbang, dicatat dalam buku tabungan masing-masing, dan dikirim ke tempat pembuangan sampah. Uang tersebut

kemudian dipotong setiap tiga bulan sekali. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada bagian metode penelitiannya. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian.

“Pengelolaan Sampah di Kota Semarang (Studi Kasus Sedekah Sampah di Perumahan Sulanji Graha, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan)” merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Elka Anggraini pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah di Kota Semarang belum berjalan dengan baik, khususnya di Perumahan Sulanji Graha, Kelurahan Ngaliyan, dan Kecamatan Ngaliyan. Hal ini disebabkan karena sampah organik dan anorganik tidak terkontrol. Padahal pengelolaan sampah penting bagi perekonomian dan kebersihan lingkungan di lingkungan Sulanji Graha. Adapun persamaan penelitian ini terletak pada bagian metode penelitiannya. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.

Hasil penelitian dari Mohammad Faoza Eksa Aditya pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah di Rusunawa Pekunden”. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan proses pengelolaan persampahan rusunawa masih memiliki kendala dalam proses manajemen yaitu pada proses perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan. Masih sedikitnya partisipan dari penghuni yang melaksanakan rencana peraturan persampahan dan rencana melalui organisasi, penghuni belum memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya dan belum terjadwalkan

pengawasan secara langsung ke lapangan oleh dinas terkait. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada bagian metode penelitiannya. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian.

Temuan penelitian “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)” yang dilakukan oleh Saebu Tri Suryo 2021. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berada di bawah standar karena tidak ada larangan hukum untuk pengangkutan sampah melalui Kecamatan Rumbai Pesisir. Pada bagian metodologi penelitian, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan. Sementara itu, lokus penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda dengan yang lain.

Hasil Penelitian dari Stevi Sriani Kakesing, Joyce J Rares, dan Verry Y Londa pada tahun 2022 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Sitaro”. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan”, Secara keseluruhan Pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro terlihat baik dan sudah cukup baik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada bagian metode penelitiannya. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian.

Temuan penelitian tahun 2019 berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Kinali, Kecamatan Kawangkoan” oleh Gita

Monica Ponamban, F.D.J. Lengkong, dan Very Y. Londa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Kinali belum berjalan dengan baik berdasarkan indikator perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang digunakan. Pada bagian metodologi penelitian, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan. Sementara itu, lokus penelitian dari penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

Temuan studi “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta”, yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Eva Anggi Ariyanti, Augustin Rina Herawati, dan Dyah Hariani. Berdasarkan temuan studi tersebut, dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola sampah di semua tahapan proses, termasuk pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berbagai peraturan yang tepat, serta pendanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan menjadi buktinya. Bagian metodologi penelitian merupakan bagian yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, lokus penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda dari yang lain.

Temuan penelitian tahun 2021 “Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah yang mampu memanfaatkan potensi sampah secara optimal” oleh Hanum Puspa Dhiani, H. Arsid, Taufik Awaludin, Ma’fiah, dan Surti Wardani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa peserta PKM mendapatkan pemahaman tentang praktik pengelolaan

sampah yang tepat. Pada bagian metodologi penelitian, terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, lokus penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda.

Temuan penelitian tahun 2017 yang berjudul “Manajemen Strategis Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro” oleh Bintang Imania Permatasari dan Dra. Meirinawati, M.AP. Berdasarkan temuan studi tersebut, strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, proses strategi tersebut masih memiliki masalah. Pada bagian metodologi penelitian, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan. Sementara itu, lokus penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda.

Temuan dari penelitian tahun 2016 oleh Elvira Suryani yang berjudul “Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi”. Berdasarkan temuan studi tersebut, dapat dikatakan bahwa program pengelolaan sampah berbasis bank sampah diantisipasi untuk mengurangi sampah di sumbernya. Dalam penerapan pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi, para pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama agar bank sampah dapat berkembang. Pada bagian metodologi penelitian, terdapat perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, lokus penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda dengan yang lain.

Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Mian et al. (2017) yang melakukan analisis menyeluruh mengenai sistem pengelolaan

sampah di kota-kota besar di negara berkembang. Penelitian ini berfokus pada proses pengumpulan, transportasi, hingga pembuangan akhir sampah dan mengidentifikasi komponen-komponen kunci dalam rantai manajemen pengelolaan sampah. Mian et al. (2017) menemukan bahwa pendekatan manajemen terpadu sangat penting untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial akibat pengelolaan sampah yang buruk.

Penelitian lain yang berfokus pada analisis manajemen sampah dilakukan oleh Zamani et al. (2019) yang mengevaluasi konsep *Zero Waste* dalam pengelolaan sampah kota di Australia. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan kebijakan berbasis teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Zamani et al. (2019) berpendapat bahwa manajemen sampah berbasis teknologi mutakhir seperti komposting dan penggunaan kembali material daur ulang dapat mengurangi beban TPA serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, penelitian oleh Das et al. (2019) juga memberikan analisis komprehensif tentang tren global dalam manajemen sampah. Mereka memperkirakan bahwa produksi sampah global akan meningkat tajam seiring urbanisasi serta pertumbuhan populasi, sehingga perlu diterapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di berbagai kota dunia. Penelitian tersebut memberikan pandangan global dan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah lokal, nasional, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Beberapa penelitian juga telah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam manajemen pengelolaan sampah. Sebagai contoh, penelitian oleh Zohoori dan Ghani (2017) mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya infrastruktur pengolahan sampah merupakan hambatan utama dalam mengelola sampah di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di tengah peningkatan jumlah sampah.

Hambatan-hambatan lain dalam manajemen pengelolaan sampah juga dikemukakan oleh Ilankoon et al. (2018) yang mengidentifikasi faktor-faktor seperti kekurangan tenaga kerja terampil, keterbatasan teknologi, serta kurangnya regulasi yang mendukung sebagai hambatan utama dalam pengelolaan sampah di negara berkembang. Mereka juga mencatat bahwa ketidakmampuan pemerintah lokal dalam memberikan layanan pengelolaan sampah yang memadai seringkali diperparah oleh minimnya partisipasi publik dalam pemilahan dan daur ulang sampah.

1.6.2 Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Istilah Latin “*dan ministrare*,” yang berarti “melaksanakan, menerapkan, dan mengendalikan,” adalah asal kata “administrasi.” Istilah “administrasi” dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja “*to administer*,” yang menunjukkan manajemen atau pengarahan. Istilah ini dikenal sebagai “*Administer*” dalam bahasa Prancis kuno, yang kadang-kadang dapat diterjemahkan sebagai “manajemen.” Manajemen atau pengaturan masalah

pribadi dikenal sebagai administrasi (pemerintahan). Administrasi merupakan proses dalam mengorganisasikan sumber-sumber yang ada sehingga tugas dalam organisasi dapat terlaksana dengan baik. Administrasi publik merupakan proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dalam formulasi, manajemen, serta mengelola keputusan kebijakan publik. Tujuan dari administrasi publik yakni untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat melalui penyempurnaan dan perbaikan pada aspek organisasi, sumberdaya manusia, serta keuangan, Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014).

Sementara itu, Barton dan Chapel menjelaskan bahwa administrasi publik adalah “the work of Government” dalam Indradi (2006: 116). Starling menjelaskan dalam Indradi (2006:116) bahwa administrasi publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan sesuai dengan keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat menjelang pemilu. Tiga peran utama dari proses administrasi adalah fungsi pengarahan organisasi (tingkat atas), fungsi manajemen organisasi (tingkat menengah), dan fungsi pengawasan (tingkat bawah), yang terkait erat dengan tiga tingkatan umum dalam hirarki formal.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Dikotomi politik-administratif (1900–1926) merupakan paradigma pertama dalam kajian administrasi publik yang ditandai oleh karya Leonard D. White (1926) dan Frank J. Goodnow (1900). Goodnow menekankan bahwa negara serta lembaga-lembaganya memiliki dua tujuan yang berbeda, yaitu politik dan administrasi (Guo, 2019). Administrasi

berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang dinyatakan oleh negara, sementara politik berfokus pada penciptaan kebijakan tersebut (Goodnow, 2017)

Paradigma kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), diwakili oleh Willoughby, di mana beliau menegaskan bahwa terdapat prinsip ilmiah tertentu dalam administrasi yang dapat diidentifikasi (Ibietan, 2019). Administrator yang memahami cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menjadi spesialis. Paradigma tersebut menganggap bahwa prinsip administratif berlaku untuk seluruh jenis organisasi, baik publik maupun swasta, tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya. Di dalamnya, prinsip administratif POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) dari Gulick dan Urwick menjadi ciri khas (Nwadike & Igbudu, 2024). Menurut Max Weber, dasar-dasar birokrasi meliputi dokumentasi tertulis, kompetensi dan profesionalisme, hierarki wewenang, standardisasi dan formalisasi, serta pembagian kerja dan spesialisasi (Shah & Khan, 2020). Herbert Simon, menegaskan bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan, sementara Waldo dan John M. Gaus menganggap administrasi publik sebagai teori politik yang berfokus pada penyediaan barang serta layanan publik dengan dimensi teoritis dan praktis (Cox et al., 2019).

Paradigma ketiga, yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), mencerminkan kembali ke disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Berbagai kritik terhadap definisi lokus administrasi publik yang

baru muncul, serta menekankan pentingnya birokrasi pemerintah dan menjauhkan fokus dari isu-isu yang terkait (Kettl, 2015). Selama periode tersebut, administrasi publik hanya mencakup 4% dari artikel yang diterbitkan di jurnal ilmu politik bergengsi antara 1960 dan 1970. Selain itu, bidang tersebut tidak diakui sebagai subjek kajian terpisah hingga tahun 1962. Upaya untuk memperkuat basis epistemologis administrasi publik dilakukan pada tahun 1960-an, meskipun Yayasan Ford menghentikan dukungan keuangan terhadap CAG akibat dari sejumlah masalah yang dihadapi (Arefeen et al., 2022).

Dalam paradigma keempat, yaitu administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956–1970), upaya dilakukan untuk mengubah administrasi publik menjadi ilmu dengan kemungkinan manajemen. Para tokoh administrasi publik seperti Edward Litchfield dan John D. Millet berusaha untuk menjadikan administrasi sebagai praktik yang memerlukan spesialisasi dan kompetensi, di mana administrasi dianggap sebagai administrasi tanpa memandang lokasi (Glick et al., 2014). Pada tahun 1956, *Administrative Science Quarterly* didirikan dengan tujuan untuk menghapus batasan antara administrasi publik, swasta, dan nirlaba.

Paradigma kelima, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang) ditandai dengan pemisahan administrasi publik dari manajemen dan ilmu politik. Pembentukan National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) menandakan pertumbuhan dan pengakuan administrasi publik sebagai cabang ilmu yang berbeda.

Fokus utama pada teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan ekonomi politik, dengan lokus pada masalah serta kepentingan publik, semakin memperkuat posisi administrasi publik dalam ranah akademis (Kettl, 2015).

1.6.4 Pengertian Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Aktivitas sehari-hari manusia seperti konsumsi, produksi, dan kegiatan industri menghasilkan berbagai jenis sampah, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, mengingat bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, sampah tersebut dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, jenis, dan sumbernya, seperti sampah rumah tangga, sampah industri, serta limbah berbahaya (Saputro & Dwiprigitaningtias, 2022). Kategorisasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengelolaan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai definisi dan klasifikasi sampah sangat penting bagi masyarakat dan pengelola lingkungan dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.6.5 Jenis Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifat, sumber, dan dampaknya terhadap lingkungan. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sisa-sisa bahan

makanan, limbah pertanian, dan sampah kebun yang dapat terurai secara alami. Jenis sampah tersebut umumnya memiliki kandungan air yang tinggi dan dapat diolah menjadi kompos, sehingga berkontribusi positif terhadap kesuburan tanah apabila dikelola dengan baik. Di sisi lain, sampah anorganik mencakup berbagai jenis bahan yang tidak dapat terurai secara alami, seperti plastik, logam, kaca, dan bahan kimia. Sampah tersebut seringkali membutuhkan proses pengolahan khusus dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar (Yang et al., 2018).

Lebih lanjut, sampah juga dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah terdiri dari campuran sampah organik dan anorganik. Sementara itu, sampah industri dihasilkan dari proses produksi di pabrik dan seringkali mengandung bahan berbahaya, sehingga membutuhkan penanganan khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan (Manahan, 2017). Selain itu, limbah medis yang berasal dari fasilitas kesehatan juga merupakan jenis sampah yang membutuhkan pengelolaan yang sangat ketat, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai jenis-jenis sampah, masyarakat dan pengelola lingkungan dapat lebih efektif dalam menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

1.6.6 Manajemen

Tindakan mengelola melibatkan pengaturan tugas-tugas yang diselesaikan oleh orang atau organisasi. Dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada, sistem manajemen harus

diterapkan untuk membantu orang atau kelompok yang bekerja bersama mencapai tujuan mereka.

Untuk mencapai tujuan dengan sukses dan ekonomis, Ricky W. Griffin berpendapat bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, koordinasi, dan pengaturan sumber daya.

Menurut Hersey dan Blanchard (2013), manajemen adalah tindakan mengoordinasikan upaya di antara individu, kelompok, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

A. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkannya, dan membuat serta menggunakan proyeksi atau asumsi untuk masa depan dengan menguraikan dan mengalokasikan tugas yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

B. *Organizing* (Pengorganisasian)

Tidak mungkin untuk mencapai organisasi tanpa berinteraksi dengan orang-orang dan memberikan tanggung jawab khusus kepada setiap unit untuk dilakukan. Menentukan, mengelompokkan, dan

mengatur berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan personel untuk tugas-tugas ini, menyediakan ruang kerja yang sesuai dengan persyaratan kerja, dan menyiapkan koneksi formal, yang ditugaskan kepada setiap individu dalam teknis dengan pelaksanaan setiap tugas yang diantisipasi, semuanya merupakan komponen pengorganisasian.

C. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Penggerakan adalah untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada setiap anggota kelompok agar sungguh-sungguh ingin mencapai tujuan dan bekerja keras untuk melakukannya sesuai dengan upaya pengorganisasian dan perencanaan pimpinan.

D. Controlling (Pengawasan)

Karena kemampuannya untuk memverifikasi apakah pekerjaan dilaksanakan dengan cara yang tertib atau terarah, pengawasan memegang peranan penting dalam manajemen. Oleh karena itu, peran pengendalian adalah mengawasi semua tindakan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut diarahkan ke sasaran dan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

1.6.6 Manajemen Publik

Manajemen publik didefinisikan sebagai manajemen pemerintahan, menurut Nor Ghofur (2014). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen publik juga bertujuan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengatur layanan publik. Administrasi Publik

digambarkan sebagai upaya individu untuk membunuh ketika mengelola organisasi dan pemanfaatan sumber daya (orang dan peralatan) untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008:93). Keban (2004:85) mengutip Overman yang mengatakan bahwa meskipun "manajemen ilmiah" memiliki dampak besar pada manajemen publik, itu bukanlah "manajemen ilmiah." Baik "analisis kebijakan" maupun "administrasi publik," yang di sisi lain menggambarkan konflik antara orientasi politik kebijakan yang berbeda, bukanlah apa yang dimaksud dengan manajemen publik. Kumpulan tugas manajemen, manajemen publik adalah studi interdisipliner tentang fitur organisasi yang luas seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. (Fina, 2020)

1.6.7 Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

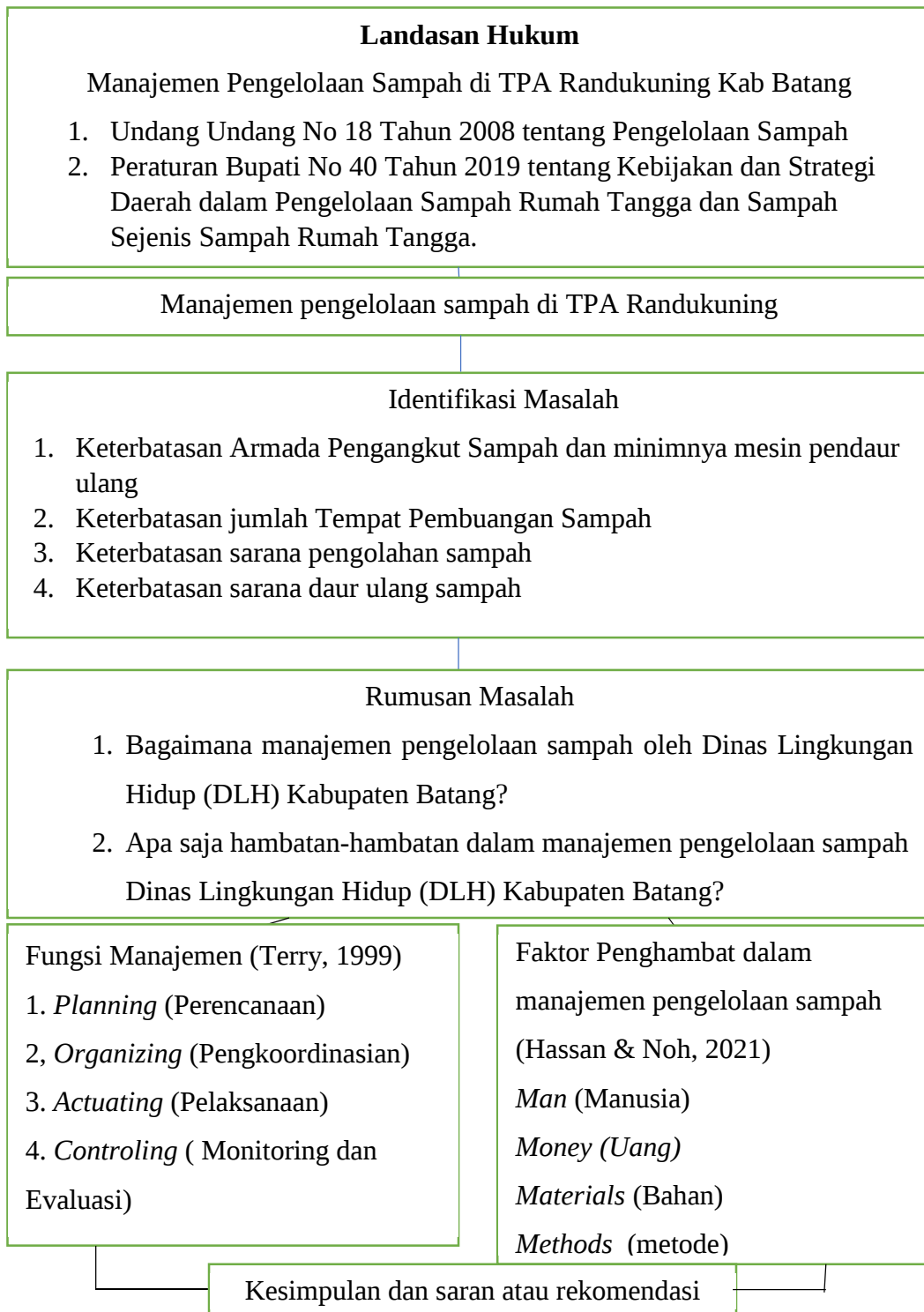
Pengumpulan, pemindahan, pemrosesan, dan daur ulang barang-barang limbah dikenal sebagai pengelolaan limbah. Frasa ini sering merujuk pada sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan ditangani untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, atau estetika.

Karena pengelolaan sampah memengaruhi banyak aspek masyarakat dan ekonomi serta merupakan masalah multisektor, pengelolaan sampah disebut sebagai "pintu utama" untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masalah kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan sumber daya, perubahan iklim, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan semuanya dipengaruhi oleh pengelolaan sampah (UNEP, 2015). Di sisi lain, pengelolaan sampah juga dapat dipandang sebagai "kemacetan sistem." Kepadatan dan distribusi penduduk, fitur lingkungan fisik dan sosial ekonomi, sikap, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat merupakan beberapa variabel yang memengaruhi pengelolaan sampah (Sahil, 2016).

Pengumpulan, pemindahan, daur ulang, atau pembuangan produk yang tidak digunakan oleh manusia dikenal sebagai pengelolaan sampah. Manusia juga sering mengelola sampah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, atau estetika. Tujuan lain dari pengelolaan sampah adalah untuk mengisi kembali sumber daya alam. Pengelolaan sampah berbeda dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, dan dari satu desa ke desa lain karena harus diterapkan secara berbeda di setiap lokasi dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama—yaitu, meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat

1.7 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.5. Kerangka Berpikir

Tabel 1.3. Fenomena Penelitian

Fenomena	Gejala yang Diamati
Fungsi manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang	- Anggaran dalam mengelola sampah. - Membuat Rencana Strategis serta Rencana Jangka Pendek dan Menengah dalam mengelola sampah di TPA Randukuning selain dengan cara meratakan gunungan sampah yang menumpuk. - Jadwal pengaturan pengangkutan sampah
	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian) Satuan Pejabat Administatif yang terdiri dari : - Kasubag Penanganan limbah sampah , Staff Kasubag penanganan limbah sampah - Kepala UPT TPA Randukuning terdiri dari

	Staf dari UPT TPA Randukuning , Tenaga Kebersihan serta tenaga angkutan sampah - Membentuk satuan gugus tugas kebersihan di setiap fasilitas umum seperti pasar batang , alun alun batang , kantor instansi pemerintah
	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Penggerakan) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang setiap hari melakukan komunikasi dengan UPT TPA Randukuning terkait <i>update</i> kondisi TPA - Saat ini , Kepala UPT TPA Randukuning selalu berkomunikasi dengan Kasubag Penanganan Limbah terkait dengan apakah anggaran yang dikucurkan untuk pengelolaan sampah cukup atau tidak

	<i>Controlling</i> (Pengawasan) - Kasubag dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan Monitoring setiap minggu terhadap kinerja pegawai UPT TPA Randukuning agar pekerjaan sesuai dengan rencana - Melakukan evaluasi terhadap UPT TPA Randukuning terkait kondisi yang ada di UPT baik kondisi internal maupun eksternal
Penghambat dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang	<i>Man</i> (Manusia) Dalam penelitian ini manusia Terdiri atas : - Para pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Pegawai UPT TPA

	Randukuning sebagai pegawai administratif seperti staf dan kasubag - Para pegawai UPT TPA Randukuning sebagai pegawai teknis serta teknisi dan sopir angkutan sampah
	<i>Money (Uang)</i> Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan program yang sudah direncanakan seperti : - menggaji pegawai dan petugas yang berperan dalam pengelolaan sampah di TPA Randukuning Kabupaten Batang - Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pengadaan truk sampah

	serta penambahan mesin pengolahan sampah
	<i>Materials (Bahan)</i> - Tersedianya tempat sampah di setiap fasilitas umum untuk mempermudah masyarakat dalam membuang sampah - Truk sampah dan excavator yang ada di TPA Randukuning pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah - Dalam rencana anggaran mendatang dianggarkan kendaraan roda 3 sebagai penunjang pengangkutan sampah
	<i>Methods (metode)</i> Metode yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

	Batang dalam pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir yaitu : - sampah yang dikumpulkan di sebuah tong sampah kemudian diangkut truk dengan bantuan pegawai sampah yang di lokasi fasilitas umum truk tersebut kemudian masuk ke TPA untuk membuang sampah
	<i>Machine</i> (Mesin) Sarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah terdiri : - 1 unit mesin pendaur ulang sampah di TPA Randukuning untuk meminimalisir sampah yang terus bertambah setiap harinya. - Dalam rencana anggaran 2024 juga akan dianggarkan

	untuk penambahan mesin pendaur ulang sampah agar sampah cepat berkurang dan tidak menumpuk
--	--

1.8 Operasionalisasi Konsep

Pengelolaan sampah merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengelola dan mengolah sampah mulai dari tahap pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Proses tersebut bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terdapat dalam sampah. Aspek yang meliputi pengelolaan sampah mencakup beberapa elemen penting antara lain sebagai berikut

1. Pengumpulan, merupakan proses pengumpulan sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan tempat umum yang dilakukan

secara terjadwal serta terencana untuk memastikan efisiensi dalam pengumpulan.

2. Pemilahan, merupakan proses memisahkan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya, seperti sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Pemilahan tersebut penting untuk mempermudah proses pengolahan lebih lanjut.
3. Pengangkutan, merupakan proses memindahkan sampah dari lokasi pengumpulan ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Aspek tersebut membutuhkan transportasi yang sesuai agar tidak terjadi pencemaran di sepanjang jalur pengangkutan.
4. Pengolahan, merupakan proses mengolah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali (*recycling*), energi (*energy recovery*), atau produk baru. Pengolahan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti *composting*, *incineration*, atau pengolahan anaerobik.

Pembuangan akhir, merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan sampah yang mencakup pembuangan sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pembuangan tersebut harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak mencemari lingkungan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Fenomena Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sugiyono (2018:213) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang diterapkan pada latar ilmiah (eksperimen) di mana peneliti memanfaatkan perangkat, prosedur

pengumpulan data, dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada makna. Hasil penelitian yang didasarkan pada laporan tinjauan data dan analisis data yang diperoleh di lapangan dilaporkan oleh peneliti secara rinci dalam laporan penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan (subjek penelitian), cocok digunakan dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek.

Menurut Gill et al. (2008), ada beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif, termasuk tinjauan pustaka, wawancara individu atau kelompok, analisis visual, dan observasi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat atau lokasi penelitian dilakukan, sekaligus sebagai sumber data penelitian, yaitu lingkungan atau tempat berlangsungnya peristiwa atau kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dipilih oleh peneliti sebagai lokus penelitian dalam penelitian ini.

1.9.3 Subjek Penelitian

Informan, yang sering disebut subjek penelitian, adalah orang yang memberikan pengetahuan tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian atau orang dalam di lingkungan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, termasuk kepala dinas dan staf pengelolaan sampah, maka peneliti

memerlukan informan.

1.9.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan yang dihubungi dan diwawancarai secara langsung oleh Peneliti. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam objek penelitian, serta melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Penggunaan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, terkini, dan sesuai dengan situasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang tidak langsung, seperti dokumen atau publikasi yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen pemerintah, artikel, serta bahan bacaan lain yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap data primer yang diperoleh.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Peneliti telah menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan telah

menghasilkan data yang komprehensif.

1. Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk menggali informasi terkait kebijakan, tantangan, dan praktik pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Melalui wawancara ini, Peneliti berhasil memperoleh data primer yang sangat berharga untuk memahami perspektif dan pengalaman para informan terkait isu pengelolaan sampah.

2. Dokumentasi

Peneliti juga telah mengumpulkan berbagai dokumen terkait untuk melengkapi hasil wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber seperti laporan resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, artikel jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, serta sumber informasi lain yang relevan. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini telah dianalisis serta digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara. Informasi yang terkumpul melalui teknik dokumentasi memberikan konteks dan pemahaman lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Batang.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Subadi, 2006) yang meliputi empat tahapan

utama: reduksi data, penyajian data, penggunaan software *Atlas.ti*, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, Peneliti telah memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dianalisis secara saksama. Data yang tidak relevan dieliminasi, sementara data yang penting dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Proses tersebut melibatkan pengkodean, pelacakan tema utama, serta penyingkatan informasi agar menjadi lebih fokus dan terstruktur.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data yang telah dikelompokkan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Penyajian data tersebut menggunakan narasi deskriptif yang disertai dengan matriks dan grafik untuk menggambarkan pola serta hubungan yang muncul dari pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Dengan menyajikan data dalam format yang lebih mudah dipahami, Peneliti dapat menilai temuan-temuan utama secara lebih jelas dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

3. Penggunaan Atlas ti

Peneliti juga menggunakan software *Atlas.ti* untuk mendukung analisis

data kualitatif yang lebih mendalam. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengorganisir, mengelola, dan menginterpretasikan data yang berbentuk teks dari wawancara serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan. *Atlas.ti* memungkinkan Peneliti menelusuri tema dan pola yang muncul dari data secara lebih sistematis. Dengan menggunakan *Atlas.ti*, Peneliti mampu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam pengelolaan sampah, seperti faktor-faktor penghambat dan solusi yang diimplementasikan oleh dinas terkait.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir penelitian ini mulai dibentuk sejak data pertama kali dikumpulkan dan dianalisis. Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data, peneliti berhasil menemukan pola-pola utama yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Tema-tema yang berulang dan hubungan kausal diidentifikasi, serta kesimpulan akhir dibuat berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang ada. Proses verifikasi kesimpulan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua informasi telah dianalisis secara akurat. Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam kesimpulan akhir yang memberikan wawasan komprehensif mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.